

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SESUAI DENGAN SURAT MENPAN RB NOMOR : B/14/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015
TANGGAL 22 DESEMBER 2015

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah

DASAR HUKUM

- ✘ Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025
- ✘ Peraturan Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
- ✘ Peraturan Menteri PAN & RB nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2

Birokrasi yang efektif dan efisien

3

Birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas

TUJUAN EVALUASI

Menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tim Aessor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi di instansi pemerintah

PERAN ASESSOR

1. Melakukan Penilaian Mandiri : Pengungkit
2. Melakukan Penilaian Mandiri : Hasil
3. Memasukkan data Rencana Perbaikan (Rencana Aksi)
4. Mencetak Lembar Penilaian

**TIM PENGARAH
REFORMASI BIROKRASI
PT. KALIMANTAN BARAT**

**TIM PMPRB
PT.
KALIMANTAN
BARAT**

TIM SEKRETARIAT

Area I KK
Manajeme
n
Peubahan

Area II KK
Penataan
Peraturan
Perundang
-undangan

Area III KK
Penataan
dan
Penguatan
Oganisasi

Area IV KK
Penataan
Tatalaksan
a

Area V KK
Penataan
Sistem
Manajeme
n SDM

Area VI KK
Penguatan
Akuntabili
tas

Area VII
KK
Penguatan
Pengawas
an

Area VII
IKK
Peningkat
an Kualtas
Pelayanan
Publik

KK = Kelompok Kerja



AREA PERUBAHAN
DAN HASIL
YANG DIHARAPKAN

MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, **kode etik, dan kode perilaku**, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan

Meningkatnya **penerapan budaya kerja positif** di setiap instansi pemerintah

Meningkatnya **citra positif aparatur** sebagai pelayan masyarakat

Perubahan ke arah perbaikan **dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak timpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

KELEMBAGAAN

Meningkatnya **ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan** kelembagaan

Menurunnya **tumpang tindih tugas dan fungsi**

TATA LAKSANA

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang **jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government**

Meningkatnya penerapan **keterbukaan informasi publik;**

Meningkatnya penerapan sistem **pengadaan barang dan jasa secara elektronik;**

Meningkatnya penerapan **manajemen kearsipan yang handal;**

SUMBER DAYA MANUSIA ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang **mengelola SDM ASN** untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.

Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang **berbasis merit**

Meningkatnya penerapan **manajemen kinerja individu** untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur

Meningkatnya **profesionalisme aparatur**

AKUNTABILITAS

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang **terintegrasi**

Meningkatnya penerapan sistem **manajemen kinerja**

Meningkatnya **akuntabilitas aparatur**

PENGAWASAN

Meningkatnya
kapasitas APIP

Meningkatnya
integritas aparatur

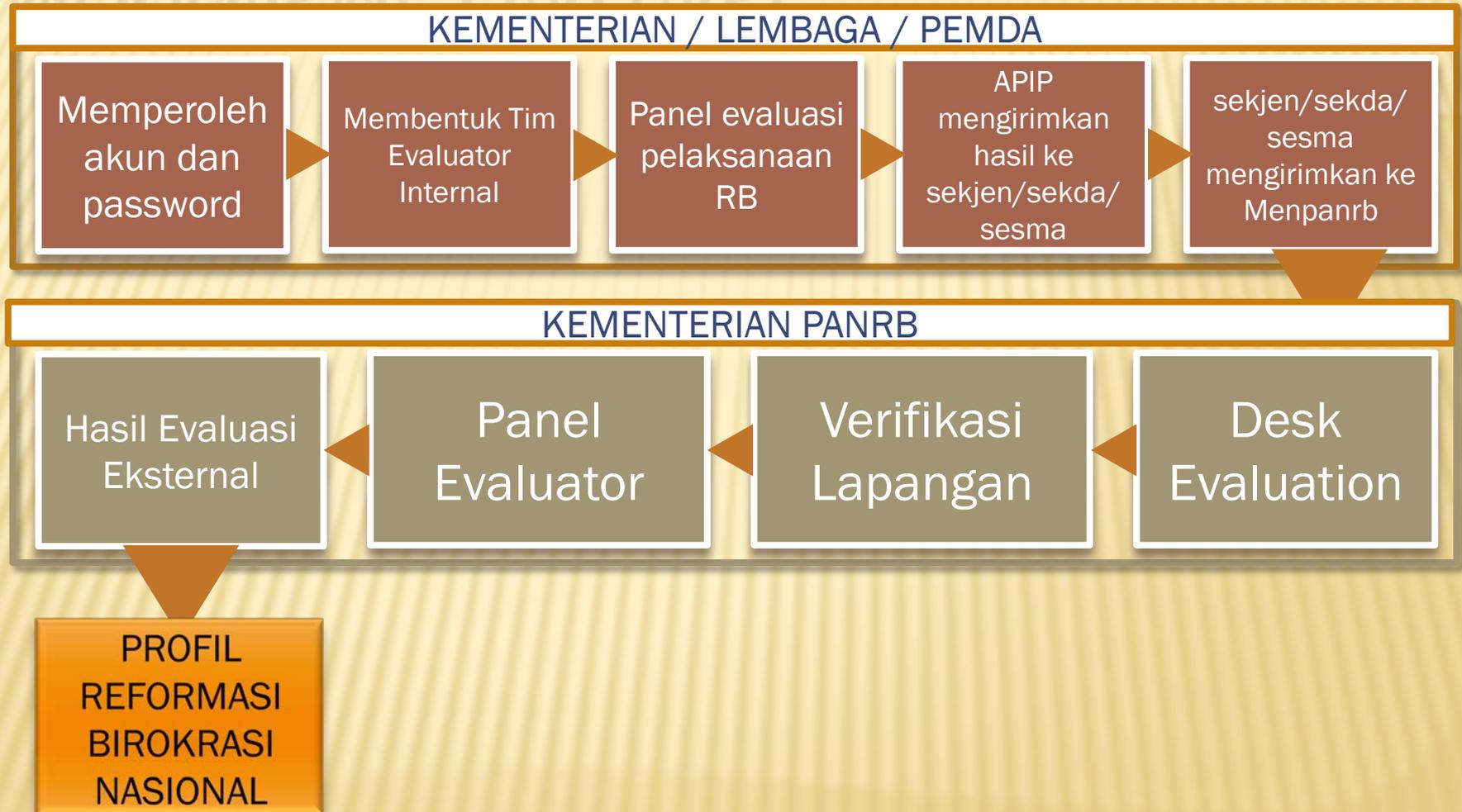
Meningkatnya
efisiensi
penyelenggaraan
birokrasi

PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

MEKANISME EVALUASI



PENGUNGKIT (60)

5

**Manajemen
Perubahan**

15

**Penataan Sistem
Manajemen SDM**

5

**Penataan Peraturan
Perundang-
undangan**

6

**Penguatan
Akuntabilitas**

6

**Penataan dan
Penguatan
Organisasi**

12

**Penguatan
Pengawasan**

5

**Penataan
Tatalaksana**

6

**Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik**

HASIL (40)

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

- Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)
- Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)
- Opini BPK (3)

Kualitas Pelayanan Publik (10)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)

TERIMA KASIH